

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

— Tahun 2021 —

Provinsi Sulawesi Tenggara



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

———— Tahun 2021 ————

Provinsi Sulawesi Tenggara



INDEKS DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2021 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No. Publikasi : 74000.2258
Katalog BPS : 4601006.74
Ukuran Buku : A5 (21 x 14,8 cm)
Jumlah Hal. : iv + 25

Naskah:

BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Penyunting Gambar:

BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Gambar Kulit:

BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Ilustrasi:

Freepik, Flaticon

Diterbitkan Oleh:

©BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Pencetak:

BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasi, dan/atau menggandakan atau sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Booklet Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. Booklet ini berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar aspek, variabel dan indikator IDI di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan demokrasi di Sulawesi Tenggara.

Materi yang disajikan dalam Booklet ini memuat hal-hal yang terkait dengan perkembangan aspek, variabel dan indikator IDI. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan demokrasi di Sulawesi Tenggara.

Kritik dan saran konstruktif berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Tenggara



Agnes Widiastuti

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Pendahuluan	1
Metodologi	7
Hasil IDI 2021	17



1

PENDAHULUAN

<https://sultra.bps.go.id>

“Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

adalah angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia”

LATAR BELAKANG

1

Mengukur perkembangan demokrasi bukanlah pekerjaan yang mudah karena luasnya pengertian demokrasi sehingga mencakup sejumlah besar objek. Oleh karena itu perlu dilakukan penentuan aspek-aspek demokrasi apa saja yang datanya akan dikumpulkan sehingga aspek yang lain tidak diperhatikan.

2

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dilaksanakan hampir 20 tahun, telah menciptakan keragaman segala aspek regional, salah satunya adalah keragaman pelaksanaan demokrasi yang dapat mengarah pada menurunnya nilai-nilai demokrasi.

3

Dalam amanah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), salah satu tugas Bappenas adalah membuat perencanaan pembangunan yang memperkuat upaya konsolidasi demokrasi dan memperdalam budaya demokrasi. Karena itu, Bappenas memerlukan alat untuk menilai keadaan demokrasi sampai tingkat daerah.

4

Sejak tahun 2009, BPS bekerjasama dengan BAPPENAS, KEMENKOPOLHUKAM, KEMENDAGRI, UNDP dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran IDI.

TUJUAN



Growth

Melihat perkembangan demokrasi dari peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum.



Measure

Menakar secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi provinsi di Indonesia hingga level Provinsi



Instrument

Sebagai instrumen perencanaan pembangunan politik di Indonesia.

MANFAAT

Secara akademis, dapat menunjukkan perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Data-data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mereka yang mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, seperti para mahasiswa, ilmuwan dan wartawan

Bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi, data-data yang disampaikan oleh IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.

Bagi pemerintah dan masyarakat di provinsi dengan tingkat perkembangan demokrasi yang kurang baik dapat menarik pelajaran dari indikator-indikator demokrasi yang bernilai rendah. Pemerintah daerah dan masyarakat di provinsi bersangkutan secara bersama-sama dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang dapat memperbaiki angka bagi indikator tersebut sehingga indeks bagi indikator itu bisa meningkat di masa yang akan datang.

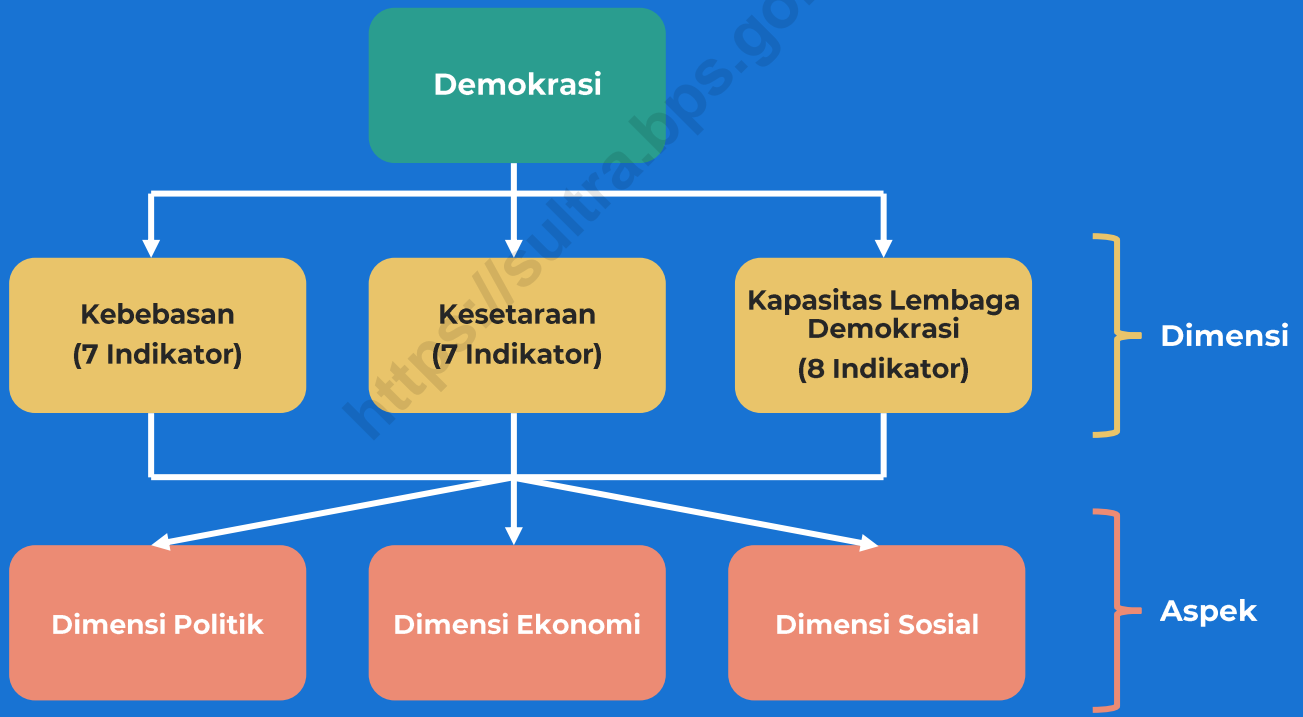


2

METODOLOGI

<https://sultra.bps.go.id>

Komponen IDI



Komponen IDI

Aspek	Indikator	Dimensi
Kebebasan	1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	Politik
	2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	Politik
	3. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	Sosial
	4. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Politik
	5. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	Politik
	6. Pemenuhan hak-hak pekerja	Ekonomi
	7. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Politik, Ekonomi, dan Sosial

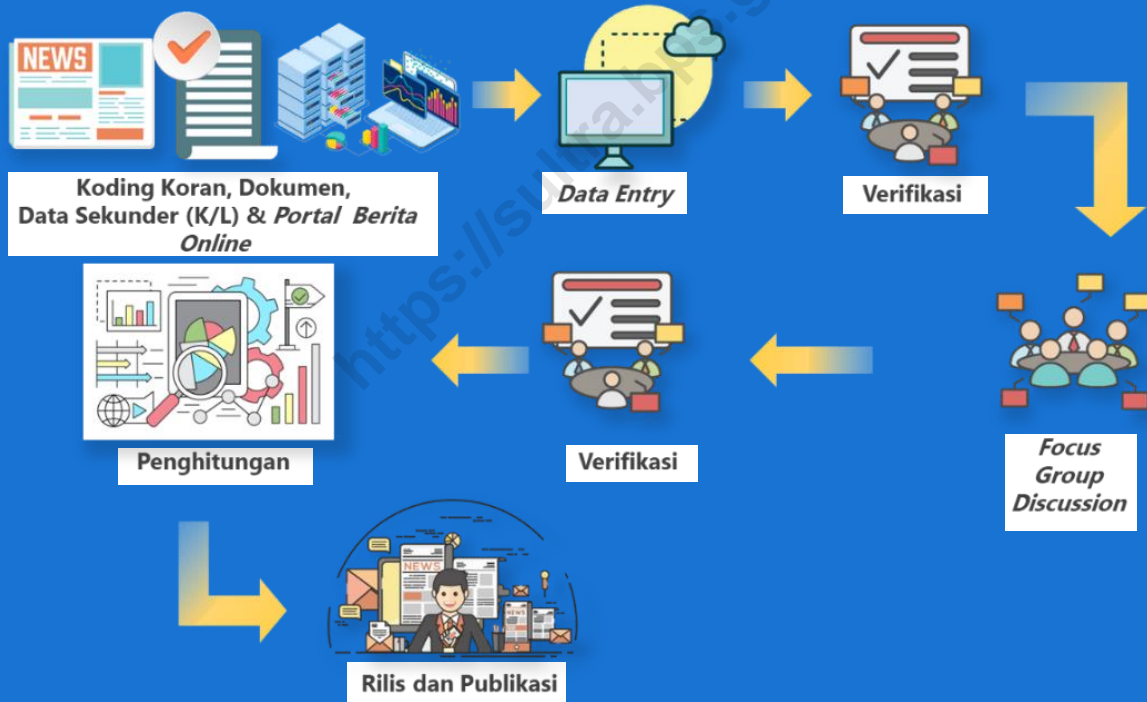
Komponen IDI

Aspek	Indikator	Dimensi
Kesetaraan	8. Kesetaraan Gender	Politik, Ekonomi, dan Sosial
	9. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	Politik
	10. Anti monopoli sumber daya ekonomi	Ekonomi
	11. Akses masyarakat pada Jaminan sosial dan perlindungan bagi warga miskin	Ekonomi
	12. Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	Ekonomi
	13. Akses masyarakat terhadap informasi publik	Politik
	14. Kesetaraan dalam pelayanan dasar	Sosial

Komponen IDI

Aspek	Indikator	Dimensi
Kapasitas Lembaga Demokrasai	15. Kinerja Lembaga Legislatif	Politik
	16. Kinerja Lembaga Yudikatif	Politik
	17. Netralitas Penyelenggara Pemilu	Politik
	18. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	Politik
	19. Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	Politik dan Sosial
	20. Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	Politik
	21. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	Politik
	22. Pendidikan politik pada kader partai politik	Politik

SKEMA PENYUSUNAN IDI





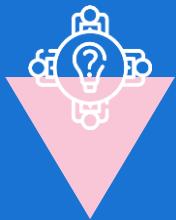
KODING SURAT KABAR

Mendokumentasikan semua peristiwa terkait indikator IDI yang diberitakan pada surat kabar yang telah dipilih dimana surat kabar tersebut memiliki oplah yang tertinggi di masing-masing provinsi. Di Provinsi Sulawesi Tenggara telah dipilih surat kabar Kendari POS.



KODING DOKUMEN

Mendokumentasikan semua dokumen tertulis yang masih berlaku dan terkait dengan indikator IDI. Dokumen dapat berupa catatan, laporan, press release, Perda, juga dapat berupa surat edaran, SK atau Peraturan Kepala Daerah.



FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Merupakan tahapan untuk mengklarifikasi data yang telah dikumpulkan pada tahap pertama, sehingga data pada tahap pertama dapat dikoreksi, dengan menghadirkan beberapa pemangku kepentingan utama sehingga dapat merepresentasikan keterwakilan dari unsur pemerintah, kelompok fraksi, kalangan pers, LSM, pemuda dan mahasiswa, tokoh politik, akademisi, tokoh adat/agama, kelompok marginal dan wanita.

MAKNA NILAI IDI

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif, dengan 0 untuk menggambarkan tingkat terendah dan 100 untuk menggambarkan tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Indeks	Makna
> 80	kinerja demokrasi tinggi (baik)
60 – 80	kinerja demokrasi sedang
< 60	kinerja demokrasi rendah (buruk)



3

HASIL IDI 2021

<https://sultra.bps.go.id>

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2021 ADALAH SEBESAR:

77,96 Poin

Kebebasan

79,28 Poin

Aspek Kebebasan memiliki skor 79,28 poin, sehingga dianggap berkategori sedang

Kesetaraan

84,09 Poin

Aspek Kesetaraan memiliki skor 84,09 poin, sehingga dianggap berkategori baik

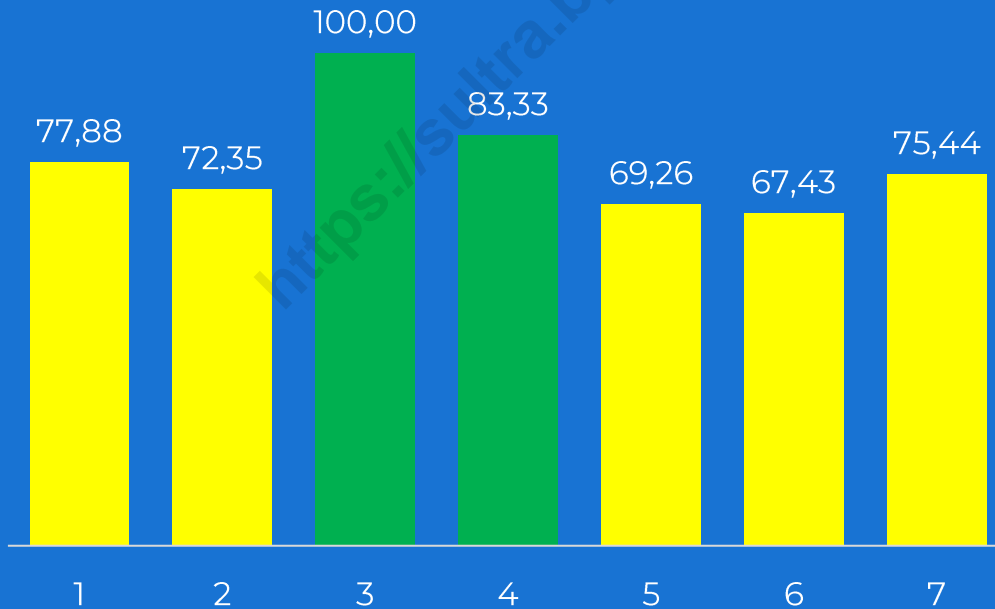
Kapasitas Lembaga Demokrasi

69,33 Poin

Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi memiliki skor 69,33 poin, sehingga dianggap berkategori sedang

ASPEK KEBEBASAN

(dalam poin)

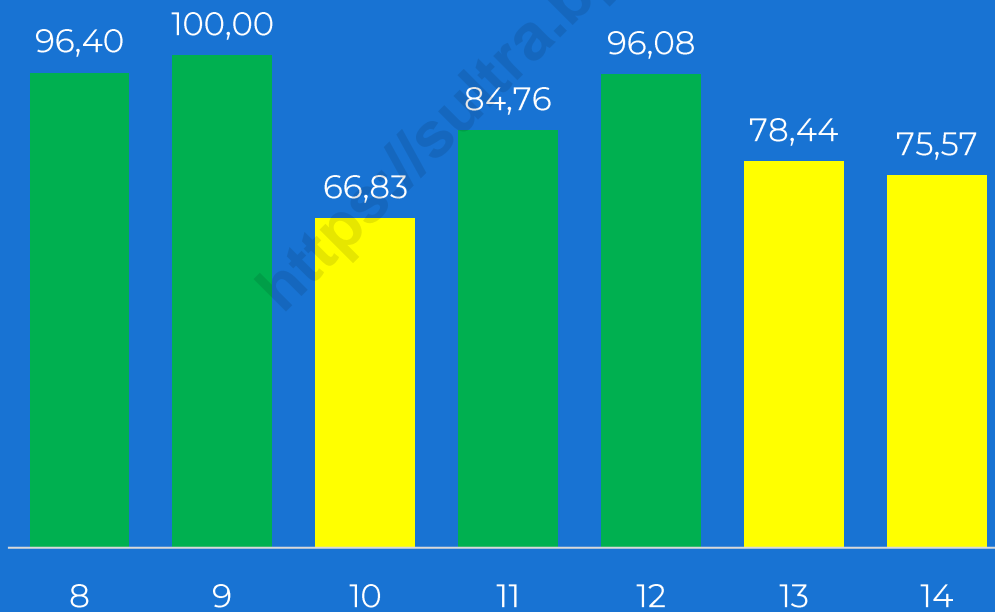




Pada **aspek kebebasan**, terdapat dua indikator yang termasuk dalam kategori baik, yaitu indikator 3 terjaminnya kebebasan berkeyakinan dan indikator 4 terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan. Sedangkan indikator lainnya berada dalam kategori sedang.

ASPEK KESETARAAN

(dalam poin)

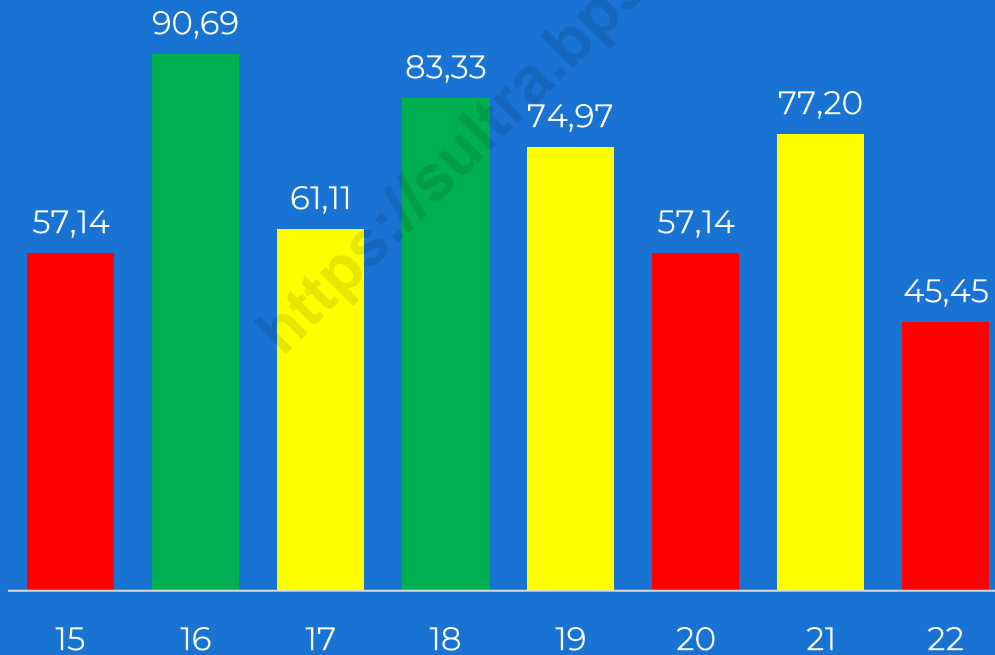




Pada **aspek kesetaraan**, terdapat empat indikator yang termasuk dalam kategori baik, yaitu indikator 8 kesetaraan gender, indikator 9 partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, indikator 11 akses masyarakat pada jaminan sosial dan perlindungan bagi warga miskin, serta indikator 12 kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah. Sedangkan indikator lainnya berada dalam kategori sedang.

ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI

(dalam poin)





Pada **aspek kapasitas lembaga demokrasi**, terdapat dua indikator yang termasuk dalam kategori baik, yaitu indikator 16 kinerja lembaga yudikatif dan indikator 18 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah. Selain itu terdapat tiga indikator berkategori buruk, yaitu indicator 15 Kinerja Lembaga Legislatif, indicator 20 Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah, dan indikator 22 Pendidikan politik pada kader partai politik. Sedangkan indikator lainnya berkategori sedang.

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

ST 2023

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jl. Boulevard No. 1, Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp. 0401-3135363, Fax. 0401-3122355
E-mail: bps7400@bps.go.id, Website: <http://sultra.bps.go.id>